

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Peranan

Menurut Thoha (2006 : 10), peranan adalah sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Sedangkan menurut Soekanto (2005 : 212), peranan merupakan aspek dari suatu kedudukan apabila orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
2. Suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dimasyarakat sebagai organisasi.
3. Peran yang didapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang – orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terhadap hubungan yang diatur oleh nilai – nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut Salbin T.R dan Allen dalam Miftah Thoha (2005 : 263), suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kemudian menurut Rivai didalam Gugun (2013 : 1498) peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam

posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut.

Menurut Koziar didalam Gugun (2013 : 1498), peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

2.2. Pengawasan

Menurut S.P Siagian (2004 : 125), pengawasan adalah proses pegamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisai untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Landri didalam buku Husaini Usman (2011:504), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastia apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya Henry Fayol dalam M.Manullang (2008 : 173), mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang dilakukan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Arman Hakim Nasution (2006 : 14), Pengawasan adalah mengatur dan membetulkan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin

sesuainya kegiatan dengan rencana menyangkut pelaksanaan kerja dengan sasaran-sasaran dan rencana - rencana, menunjukkan penyimpangan-penyimpangan negative yang ada, dan mengambil tindakan pembetulan untuk penyimpangan itu, membantu menjamin terlaksananya rencana-rencana.

Selain itu menurut Leslie W. Rue (2010 : 9), Controlling adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan - tujuan, menentukan sebab - sebab penyimpangan - penyimpangan dan mengambil tindakan - tindakan korektif dimana perlu. Sedangkang Manullang (2006 : 177), menjelaskan pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Menurut Husaini Usman (2011 : 503), pengendalian (pengawasan) atau Controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengendalian ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Menurut George R. Terry (2003 : 166), pengendalian ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang - orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Menurut Douglas S. Sherwin (2006 : 525), mengatakan bahwa pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang sudah ditentukan, dan dasarnya adalah informasi yang dimiliki oleh para manajer.

Kemudian Dale (dalam Winardi, 2000 : 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Selanjutnya menurut Admosudirdjo dalam Febriani (2005 : 11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Fremon E. Kast (1991 : 729), pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas - batas yang diizinkan yang diukur dari harapan - harapan. Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2003 : 25), mengatakan bahwa pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengawasan sangat penting dalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan dan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Begitu pula fungsi pengorganisasian dan pegerakan sebagai unsur manajemen, maka pengawasan berusaha meluruskan dan mengoreksi segala aktifitas-aktifitas

dilapangan supaya benar-benar mengarah pada usaha tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

2.2.1.Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317), mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Selanjutnya menurut T. Hani Handoko (2003 : 26), fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
3. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Sedangkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 3.

1. Mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.2.2. Tujuan dari Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Soekarno dalam Safrudin (2002 : 36), adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan - kesulitan dan kelemahan - kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan - kesulitan, kelemahan - kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Sedangkan menurut Griffin dalam Tisnawati Sule (2005 : 318), menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari pengawasan, yaitu:

1. Adaptasi lingkungan, yaitu bertujuan agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dilingkungan perusahaan, baik bersifat lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan, yaitu untuk meminimumkan kegagalan, ketika perusahaan melakukan produksi, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
3. Meminimumkan biaya, yaitu bertujuan untuk meminimumkan biaya, baik pada kegiatan memproduksi maupun yang lainnya.
4. Antisipasi kompleksitas organisasi, yaitu agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

Situmorang (2001: 26), mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan - kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Sedangkan menurut Henry Fayol dalam Manullang (2008 : 173), tujuan utama dari pengawasam ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan - penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun diwaktu - waktu yang akan datang.

Dari pendapat ahli di atas yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari sebuah pengawasan adalah :

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi - instruksi yang telah di buat.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kesulitan, kelemahan atau kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan, serta efisiensi dan efektivitas kerja.

3. Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi, tetapi juga yang terjadi dimasa yang akan datang.

2.2.3. Jenis - jenis Pengawasan

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008 : 139), mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Sedangkan menurut pendapat Bohari (1992:25), membagi jenis pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai jenis, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebihburuk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

2.2.4. Pentingnya Pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.

Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Menurut Siswanto (2009 : 200), ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya

peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam - macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selaludimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah diagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu

sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

2.2.5. Pengawasan yang Efektif

Menurut Sarwoto (2010 : 28), pengawasan yang efektif yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.

5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Adapun pengawasan yang efektif berdasarkan tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memacu pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 262 (1) dan Pasal 265 (1), yang berbunyi:

Pasal 262 (1).

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

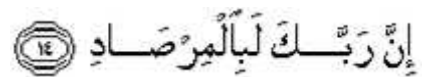
Pasal 265 (1).

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik Kendaraan Bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

2.3. Ayat Tentang Pengawasan

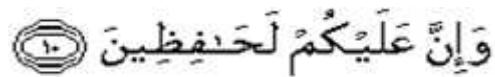
Didalam islam Allah telah menggariskan konsep pengawasan yang diberikan oleh islam telah tercakup semua sisi kemanusiaan, baik mencakup semua orang mu'min, sejak ia baligh sampai matinya, dari perkataan, perbuatan sampai pada kata hatinya.

Hal ini telah dijelaskan oleh Allah secara umum dalam QS Al-Fajr, (89 :ss14), yaitu :



Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Selanjutnya Allah juga mengawasi makhluknya dalam berbagai aktifitas yang telah dijelaskan dalam QS Al-Infitar, (82 : 10), yaitu:



Artinya :Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat - malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu).

Pengawasan yang paling tepat adalah pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri, tetapi bukan dari atasan jabatanpun orang lain. Karena Al-Qur'an telah memberikan petunjuk, bahwa setiap apa yang kita perbuat atau kita lakukan itu tidak terlepas dari pengawasan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pengawasan yang paling hakiki adalah pengawasan yang berasal dari Allah SWT. Serta yang dilakukan oleh manusia terhadap diri dan lingkungannya tentunya memiliki keterbatasan.

2.4. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan adalah sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.
2. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain oleh berbagai jenis kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
4. *Travel* atau yang disebut Biro perjalanan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang.
5. *Travel* gelap adalah kendaraan pribadi yang mengangkut penumpang baik orang atau barang dan dikenai biaya dari penumpangnya.

2.5. Konsep Operasional

Konsep operasional diambil berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas dalam pasal 3, yang berbunyi lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berfungsi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Merwujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tabel 2.1 konsep operasional

No	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	Fungsi pengawasan (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 3)	Mewujudkan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar.	a. Pengaturan b. Pengawasan c. Pengendalian
		Mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa	a. Profesionalitas b. Akuntabilitas c. Sosialisasi d. Pembinaan
		Penegakan hukum dan kepastian hukum	a. Melaksanakan peraturan yang berlaku b. Pemberian sanksi

2.6. Kerangka Berpikir

